



PENYIMPANGAN NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PRAKTIK KEPEMIMPINAN DI ERA POLITIK MODERN

Tisnowati Wulan Agustin Meika^{1*}, Ellen Harum Ismawati², Sofy Hidayatu
Mutiya³, Rahma Evelyn Hardina Putri⁴, Hilma Amilia Zahiroh⁵, Kusnul
Khotimah⁶

¹⁻⁵ Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Surabaya

⁶ Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Negeri Surabaya

*Penulis Korespondensi: 25020074094@mhs.unesa.ac.id¹, 25020074096@mhs.unesa.ac.id²,
25020074109@mhs.unesa.ac.id³, 25020074246@mhs.unesa.ac.id⁴, 25020074059@mhs.unesa.ac.id⁵,
kusnulshotimah@unesa.ac.id⁶

Abstract. *This research examines how the values of Pancasila have been deviated in leadership practices in the modern political era. The objective of this study is to identify the factors leading to these deviations and their impact on leadership structures in Indonesia. The results indicate a decline in the application of Pancasila values, particularly concerning justice and solidarity, due to the influence of globalization and pragmatic politics. The conclusion suggests the need for revitalizing Pancasila values in education and policy to reinforce national identity and a sustainable democratic system.*

Keywords: *Pancasila, Leadership, Modern Politics, Value Deviation, Globalization, Solidarity.*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji bagaimana nilai-nilai Pancasila mengalami penyimpangan dalam praktik kepemimpinan di era politik modern. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyimpangan tersebut dan dampaknya terhadap struktur kepemimpinan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat penurunan dalam penerapan nilai-nilai Pancasila, khususnya dalam hal keadilan dan solidaritas, akibat dari pengaruh globalisasi dan politik pragmatis. Kesimpulan menunjukkan perlunya revitalisasi nilai Pancasila di dalam pendidikan dan kebijakan untuk memperkuat identitas nasional dan sistem demokrasi yang berkelanjutan.

Kata kunci: Pancasila, Kepemimpinan, Politik Modern, Penyimpangan Nilai, Globalisasi, Solidaritas.

LATAR BELAKANG

Pancasila, sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia, diharapkan menjadi panduan utama dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam praktik kepemimpinan. Namun, di era politik modern yang ditandai oleh dinamika globalisasi, keterhubungan teknologi, dan kompleksitas sosial-politik, sering kali ditemukan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila dalam praktik kepemimpinan di Indonesia. Latar belakang masalah ini mencerminkan kebutuhan untuk menelaah bagaimana dan mengapa nilai-nilai tersebut menyimpang dari prinsip idealnya.

Berbagai studi sebelumnya telah menunjukkan bahwa penyimpangan ini berakar pada pengaruh eksternal dan internal, seperti tekanan politik global, perubahan nilai-nilai budaya lokal, serta adopsi strategi politik pragmatis yang tidak selaras dengan sila-sila Pancasila. Meski demikian, kajian komprehensif yang menghubungkan antara penyimpangan nilai-nilai dengan praktik kepemimpinan dalam konteks politik modern masih minim.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab penyimpangan nilai Pancasila dalam praktik kepemimpinan dan menganalisis dampaknya terhadap struktur dan efektivitas kepemimpinan di Indonesia. Dengan memahami mekanisme penyimpangan dan

dampaknya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi konkret untuk mengintegrasikan kembali nilai-nilai Pancasila dalam praktik kepemimpinan demi memperkuat identitas dan persatuan nasional dalam menghadapi dinamika politik global.

METODE PENELITIAN

Metode yang dipakai didalam penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan atau penelitian library research, serta bentuk penelitian yang dipakai yaitu penelitian hukum normative merupakan penelitian atau analisis yang digunakan untuk memecahkan masalah hukum secara normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk penyimpangan nilai-nilai Pancasila dalam praktik kepemimpinan di era politik modern

Nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila seharusnya menjadi fondasi moral dan pedoman dalam menjalankan kepemimpinan serta mengelola pemerintahan. Namun, dalam praktik politik kontemporer, masih banyak terlihat tindakan para pemimpin yang tidak sejalan dengan nilai-nilai tersebut. Penyimpangan ini muncul dari berbagai tindakan yang lebih memprioritaskan kepentingan pribadi atau kelompok dibandingkan dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Berikut bentuk penyimpangan nilai nilai Pancasila dalam praktik kepemimpinan di era sekarang (politik modern):

1. Nilai Keadilan dan Kemanusiaan

Salah satu jenis penyimpangan yang paling umum terjadi adalah tindakan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dalam banyak kasus di Indonesia, praktik korupsi dilakukan oleh pejabat publik yang memiliki wewenang dalam pengambilan keputusan. Tindakan ini jelas bertentangan dengan nilai keadilan dan kemanusiaan yang terkandung dalam Pancasila. Kepemimpinan yang seharusnya fokus pada kesejahteraan masyarakat malah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Tindakan semacam ini menunjukkan bahwa nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan sosial belum sepenuhnya diterapkan dalam sistem kepemimpinan saat ini.

2. Nilai Persatuan dan Musyawarah

Selain itu, nepotisme dan kepentingan kelompok juga merupakan bentuk penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Dalam politik modern, keputusan politik sering kali lebih dipengaruhi oleh kepentingan partai, keluarga, atau kelompok tertentu ketimbang kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini berlawanan dengan semangat persatuan dan musyawarah yang merupakan prinsip dalam sila keempat Pancasila. Kepemimpinan yang seharusnya mengedepankan kepentingan bersama justru berfungsi sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan atau memperkuat jaringan politik tertentu.

3. Nilai Keadilan Sosial

Bentuk penyimpangan yang lain dapat dilihat dari ketidakadilan dalam kebijakan publik. Beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemimpin terkadang lebih menguntungkan segmen tertentu dan kurang memperhatikan kesejahteraan masyarakat secara merata. Kondisi ini menunjukkan bahwa nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia belum sepenuhnya diwujudkan dalam praktik kepemimpinan. Padahal, tujuan utama dari kepemimpinan dalam sistem negara yang berlandaskan Pancasila adalah untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat.

Dengan demikian, berbagai jenis penyimpangan tersebut mengindikasikan bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila dalam praktik kepemimpinan masih menghadapi banyak tantangan di era politik modern. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari para pemimpin untuk menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar utama dalam menjalankan kekuasaan dan mengambil keputusan, sehingga kepemimpinan dapat berjalan dengan adil, transparan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

Faktor yang menyebabkan terjadinya penyimpangan nilai-nilai Pancasila dalam kepemimpinan politik saat ini

1. Lemahnya Internalisasi dan Pemahaman Nilai Pancasila

Salah satu faktor utama yang memicu terjadinya penyimpangan nilai-nilai Pancasila dalam kepemimpinan politik adalah rendahnya pemahaman serta kesadaran nilai Pancasila di kalangan masyarakat maupun kalangan elit politik. Pancasila seharusnya tidak hanya dianggap sebagai simbol negara, tetapi juga digunakan sebagai pedoman moral dalam menjalankan kehidupan politik dan pemerintahan. Namun, di dalam praktiknya, banyak pemimpin politik hanya menganggap Pancasila sebagai kalimat slogan yang digunakan dalam pidato atau dokumen resmi tanpa benar-benar menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan nyata. Kondisi ini menciptakan perbedaan antara nilai-nilai Pancasila dengan praktik politik yang terjadi di lapangan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Alfred Benu dkk., fenomena ini dapat dilihat dari berbagai praktik politik yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, seperti korupsi, politik uang, penyalahgunaan kekuasaan, polarisasi politik, serta penyebaran ujaran kebencian. Fenomena ini menunjukkan bahwa nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, dan persatuan masih belum sepenuhnya teraplikasikan dalam sistem politik Indonesia (Benu et al., 2025).

Selain itu, I Made Kartika juga menjelaskan bahwa salah satu penyebab terjadinya penyimpangan etika politik adalah ketidakpahaman masyarakat dan kalangan elit politik terhadap makna Pancasila sebagai dasar etika politik dalam penyelenggaraan negara. Jika Pancasila tidak dipahami dengan baik, prinsip-prinsip seperti kemanusiaan, keadilan sosial, dan musyawarah dalam pengambilan keputusan tidak akan menjadi dasar dalam praktik politik (Kartika, 2015).

Dengan demikian, bisa dibilang bahwa kurangnya pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila menjadi salah satu penyebab utama terjadinya penyimpangan etika dalam kepemimpinan politik saat ini.

2. Berkembangnya Budaya Politik Pragmatis

Faktor berikutnya yang menyebabkan penyimpangan nilai Pancasila adalah berkembangnya budaya politik pragmatis dalam sistem politik Indonesia. Politik pragmatis adalah cara berpolitik yang lebih fokus pada pencapaian kekuasaan dan keuntungan dalam waktu singkat dibandingkan pada nilai-nilai moral atau kepentingan rakyat.

Artikel Alfred Benu dkk., menjelaskan bahwa praktik politik pragmatis dapat berupa politik uang, menyamarakan informasi, serta strategi politik yang memecah belah masyarakat guna memenangkan persaingan pemilu. Dalam kondisi seperti ini, nilai-nilai Pancasila seperti kejujuran, persatuan, dan keadilan sosial sering kali diabaikan demi kepentingan politik tertentu (Benu et al., 2025).

Politik yang terlalu mencari keuntungan juga membuat proses demokrasi kehilangan nilai-nilai moralnya. Demokrasi yang seharusnya menjadi cara untuk mencapai kesejahteraan rakyat malah menjadi tempat persaingan kekuasaan yang sering kali menerima berbagai tindakan tidak terpuji. Akibatnya, nilai-nilai etika politik yang berasal dari Pancasila tidak lagi menjadi prioritas dalam pengambilan keputusan politik.

3. Rendahnya Keteladanan Elit Politik

Faktor lain yang memengaruhi terjadinya penyimpangan nilai Pancasila adalah kurangnya teladan yang diberikan oleh para elit politik dan pemimpin negara. Dalam sistem politik, pemimpin memainkan peran penting sebagai teladan bagi masyarakat dalam menunjukkan dan menerapkan nilai-nilai moral serta etika yang benar. Namun fakta yang ada, banyak kasus pelanggaran hukum yang melibatkan pejabat publik menunjukkan bahwa sebagian besar dari elit politik masih belum bisa menjadi contoh yang baik bagi masyarakat. Kasus korupsi, penyalahgunaan jabatan, dan konflik kepentingan menunjukkan bahwa nilai moral dalam kepemimpinan politik masih kurang kuat.

Kurangnya teladan dari kalangan elit politik dapat memperburuk kualitas budaya politik dalam masyarakat. Ketika orang yang memimpin tidak memiliki kejujuran dan rasa tanggung jawab, masyarakat bisa kehilangan kepercayaannya terhadap sistem politik dan pemerintahan (Benu et al., 2025). Hal ini menunjukkan pentingnya keteladanan moral pemimpin dalam menjaga terus nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan politik.

4. Lemahnya Penegakan Hukum dan Pengawasan Politik

Faktor selanjutnya adalah kurangnya kekuatan sistem hukum dan pengawasan terhadap pejabat negara. Dalam etika politik yang mengikuti Pancasila, kekuasaan harus dikelola berdasarkan tiga prinsip penting, yaitu asas legalitas, demokrasi, dan moralitas (Kartika, 2015).

Namun di lapangan, penerapan hukum terhadap pelanggaran politik sering kali tidak sama di setiap kasus. Beberapa kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang menunjukkan bahwa sistem hukum belum sepenuhnya mampu memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana. Jika hukum tidak diberlakukan secara adil dan tegas, maka tindakan-tindakan politik yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila bisa terus berlangsung. Selain itu, kurangnya pengawasan terhadap lembaga politik juga memberi kesempatan bagi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Tanpa adanya kontrol yang baik, para pemimpin politik bisa memanfaatkan kekuasaan mereka untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.

5. Konflik Sosial dan Politik Identitas

Faktor lain yang memengaruhi penyimpangan nilai Pancasila adalah munculnya konflik sosial serta pemanfaatan politik identitas dalam proses kompetisi politik. Dalam masyarakat yang beragam seperti Indonesia, perbedaan agama, suku, dan budaya seharusnya menjadi kekuatan dalam memperkuat persatuan bangsa. Namun dalam politik modern, perbedaan itu sering digunakan sebagai cara untuk mendapatkan dukung politik. Isu mengenai agama, suku, atau identitas kelompok tertentu sering digunakan sebagai cara dalam kampanye yang bisa memicu terjadinya konflik sosial di masyarakat.

Kartika menjelaskan bahwa konflik sosial yang dipicu oleh perbedaan pandangan politik atau agama dapat menghambat terwujudnya etika politik yang berlandaskan nilai Pancasila. Meskipun salah satu prinsip penting dalam Pancasila adalah persatuan dan kesatuan bangsa, di mana kepentingan negara ditempatkan di atas kepentingan kelompok (Kartika, 2015).

Saat politik identitas semakin kuat, masyarakat semakin terbelah menjadi beberapa kelompok yang saling bertentangan. Hal ini tidak hanya melemahkan persatuan nasional, tetapi juga memperparah kualitas demokrasi di Indonesia.

Dampak Penyimpangan Nilai-nilai Pancasila Terhadap Masyarakat dan Sistem Pemerintahan

Pancasila, pandangan hidup bangsa Indonesia, dan dasar negara, berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jika nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, seperti keadilan sosial, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan, tidak diterapkan secara efektif atau bahkan dimasukkan ke dalam praktik kehidupan sosial dan pemerintahan, hal itu dapat berdampak negatif pada masyarakat dan sistem pemerintahan.

1. Dampak terhadap Kehidupan Masyarakat

Perbedaan dari prinsip-prinsip Pancasila dapat menyebabkan berbagai masalah dalam masyarakat. Salah satu efeknya adalah rasa persatuan dan kesatuan yang menurun. Masyarakat dapat mudah terpecah oleh perbedaan suku, agama, ras, dan golongan ketika prinsip persatuan tidak lagi dipertahankan. Ini dapat menyebabkan konflik sosial yang membahayakan kehidupan bersama.

Selain itu, ketidaksesuaian dengan nilai kemanusiaan dapat menyebabkan peningkatan pelanggaran hak asasi manusia, ketidakadilan, dan diskriminasi. Dalam

situasi seperti ini, masyarakat tidak lagi memiliki prinsip adil dan beradab yang terkandung dalam sila kedua Pancasila.

Menurunnya kepedulian sosial dan sikap gotong royong juga merupakan dampak lain. Kepentingan bersama tidak lagi menjadi prioritas masyarakat. Meskipun demikian, nilai kebersamaan dan solidaritas adalah bagian dari kehidupan sosial masyarakat Indonesia.

2. Dampak terhadap Sistem Pemerintahan

Penyimpangan dari prinsip-prinsip Pancasila dapat berdampak besar pada struktur pemerintahan. Ada peningkatan praktik penyalahgunaan kekuasaan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme, sebagai akibatnya. Prinsip pemerintahan yang bersih dan prinsip keadilan sosial bertentangan dengan praktik ini.

Selain itu, demokrasi dapat menjadi lebih buruk jika ada penyimpangan dari nilai kerakyatan. Pemerintah yang seharusnya menjalankan kekuasaan berdasarkan kehendak rakyat justru dapat bertindak tidak transparan dan kurang memperhatikan aspirasi masyarakat.

Dampak lainnya adalah menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketika pemerintah tidak menjalankan nilai-nilai Pancasila dengan baik, masyarakat akan merasa kecewa dan kehilangan kepercayaan terhadap lembaga negara. Kondisi ini dapat menghambat pembangunan nasional serta menciptakan ketidakstabilan dalam kehidupan bernegara.

3. Upaya Mengatasi Penyimpangan Nilai-Nilai Pancasila

Semua pihak harus melakukan berbagai upaya untuk mengatasi pelanggaran prinsip-prinsip Pancasila. Pemerintah harus meningkatkan penegakan hukum dan meningkatkan transparansi tentang bagaimana pemerintah beroperasi. Selain itu, generasi muda harus terus dididik tentang Pancasila sehingga mereka dapat memahami dan mengamalkan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan menumbuhkan rasa toleransi, menghargai perbedaan, dan semangat gotong royong, masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila dapat terus menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengembalikan praktik kepemimpinan agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila

Pancasila merupakan ideologi dan dasar negara yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya mencerminkan moralitas, keadilan, dan kemanusiaan. Namun, dalam praktik kepemimpinan saat ini, nilai-nilai tersebut sering kali tidak dijalankan secara konsisten.

Fenomena seperti korupsi, ketimpangan sosial, dan lemahnya penegakan hukum menunjukkan adanya krisis moral dalam kepemimpinan. Oleh karena itu, diperlukan upaya konkret untuk mengembalikan praktik kepemimpinan agar selaras dengan nilai-nilai Pancasila.

1. Penguatan Integritas dan Etika Kepemimpinan

Integritas merupakan fondasi utama dalam kepemimpinan yang berlandaskan Pancasila. Pemimpin harus menjunjung tinggi kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan. Nilai ini sejalan dengan sila pertama dan kedua.

2. Revitalisasi Pendidikan Pancasila

Pendidikan Pancasila harus diperkuat sebagai dasar pembentukan karakter bangsa. Hal ini dapat dilakukan melalui kurikulum yang menekankan nilai-nilai moral dan praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Peran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sangat penting dalam mengembangkan sistem pendidikan yang berorientasi pada karakter.

3. Reformasi Sistem Politik dan Birokrasi

Sistem politik yang sehat akan melahirkan pemimpin yang berkualitas. Reformasi perlu dilakukan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

4. Keteladanan Pemimpin

Pemimpin harus menjadi contoh bagi masyarakat. Keteladanan ini mencerminkan nilai Pancasila secara nyata, terutama dalam hal keadilan dan kemanusiaan.

5. Partisipasi Aktif Masyarakat

Masyarakat memiliki peran penting dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Partisipasi aktif ini mencerminkan nilai demokrasi dalam sila keempat Pancasila.

6. Penguatan Budaya Anti-Korupsi

Korupsi merupakan salah satu penyimpangan terbesar dari nilai Pancasila. Oleh karena itu, perlu adanya upaya sistematis untuk memberantasnya. Peran Komisi Pemberantasan Korupsi sangat penting dalam membangun budaya anti-korupsi melalui edukasi dan penegakan hukum.

7. Penegakan Hukum yang Adil

Penegakan hukum harus dilakukan secara adil tanpa diskriminasi. Hal ini mencerminkan nilai keadilan sosial dalam Pancasila.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjabaran materi di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai Pancasila seharusnya menjadi pondasi utama dalam praktik kepemimpinan dan pengelolaan di pemerintahan. Tetapi, dalam kenyataannya di pemerintahan kita saat ini yang terbelang politik modern, masih banyak terjadi penyelewengan seperti korupsi, nepotisme, ketidakadilan kebijakan, serta penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan. Hal ini menunjukkan bahwa, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yakni nilai keadilan, kemanusiaan, persatuan, dan musyawarah belum sepenuhnya diterapkan secara konsisten oleh para pemimpin dalam pemerintahan kita.

Penyimpangan tersebut tidak akan terjadi jika tidak ada penyebabnya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi, antara lain lemahnya pemahaman terhadap nilai nilai pancasila, meningkatnya budaya politik yang lebih mementingkan keuntungan, kurangnya keteladanan parapemimpin, lemahnya penegakan hukum, serta munculnya politik identitas yang memecah persatuan. Konteks ini kemudian berimbas kepada penurunan kepercayaan masyarakat, melemahnya persatuan dan kesatuan serta terganggunya praktik kepemimpinan yang seharusnya berjalan secara adil dan demokratis.

Oleh karena itu, sangat diperlukan, usaha secara bersama sama untuk mengembalikan praktik kepemimpinan, agar selaras dengan nilai nilai pancasila. Usaha tersebut dapat terwujud melalui penguatan integritas dan etika kepemimpinan, revitalisasi (penguatan) pendidikan pancasila, reformasi sistem politik dan birokrasi, keteladanan pemimpin, partisipasi aktif masyarakat, penguatan budaya anti korupsi, dan penegakan hukum yang adil. Dengan demikian, diharapkan kepemimpinan di era politik modern saat ini, dapat kembali mengarah kepada kepentingan rakyat bukan hanya individu, menjunjung tinggi keadilan, serta mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

DAFTAR REFERENSI

- Benu, A., & ddk. (2025). KESENJANGAN ANTARA NILAI PANCASILA DENGAN REALITAS ETIKADALAM KONDISI POLITIK INDONESIA MASA KINI. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10 Nomor4.
- Benu, A., dkk. (2025). Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam etika politik di Indonesia. *Jurnal Ilmiah*, 16(3), 395–402.
- Ifan, M. (2024). Kepemimpinan Pancasila dalam era pemerintahan baru Indonesia. *Jurnal Pembumian Pancasila*.
- Karniawati, N., & Pahlevi, M. D. (2025). Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam menanggulangi kasus korupsi di Indonesia. *Governance: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*, 12(2), 111-115.
- Kartika, I. M. (2015, November). NILAI-NILAI PANCASILA DALAM MEMBANGUN ETIKA POLITIK DI INDONESIA. *Jurnal Kajian Pendidikan Widya Accarya FKIP Universitas Dwijendra*.
- Mutia, D., dkk. (2023).Kepemimpinan dan penerapan Pancasila sebagai ideologi negara dalam membangun masyarakat yang adil dan berkeadilan. *Advances in Social Humanities Research*.
- Novitasari, H. B. (2021). Penyimpangan nilai-nilai dasar Pancasila pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. *Jurnal Pancasila dan Bela Negara*, 1(2), 11-12.

- Saktiawan, E. B., dkk. (2025). Falsafah Pancasila dalam kepemimpinan nasional. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*.
- Wibawa, Y. Y. (2023). Implementasi nilai-nilai kebangsaan dari NKRI guna meningkatkan kualitas kepemimpinan. *Jurnal Pembumian Pancasila*.
- Winarno, I. A., dkk. (2025). Kepemimpinan transformasional berbasis kejuangan, integritas, dan Pancasila. *Jurnal Pendidikan Tambusai*.